

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian latar alamiah, dengan maksud mentafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melihatkan berbagai metode yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan pengambilan lokasi tersebut adalah dari pantauan dilapangan, saat ini permasalahan Ketertiban Umum dalam Operasional Warnet/Game Station semakin bertambah seiring dengan globalisasi di lokasi kecamatan tersebut.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik warnet/penjaga warnet dan Satpol PP yang ada di kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya Rincian dari populasi serta responden dan informan dalam penelitian ini dapat dilihat data tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel yang Dijadikan Respoden di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pemilik Warnet/Penjaga Warnet	36	36	100
2	Kepala Satuan Satpol PP	1	1	100
3	Kasi Tribumtramas	1	1	100
Jumlah		38	38	300

Sumber : Data Olahan, 2013

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah digunakan untuk Pemilik Warnet/Penjaga Warnet dan Aparatur Satpol pp dalam penelitian ini di gunakan teknik sensus. Teknik sensus adalah teknik yang menjadikan seluruh populasi yang ada sebagai sampel.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel yang dipilih (responden) dan pihak-pihak yang terkait baik dengan quisioner, interview, maupun melalui observasi. Adapun data yang dicari adalah mengenai data Implementasi Tentang Ketertiban Tertib Usaha Warnet/Game Station di Kecamatan tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari instansi yang terkait dalam masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai pelengkap landasan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis,

buku dan sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- Quesioner (Daftar Pertanyaan), Yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang diinginkan.
- Interview (Wawancara), Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, karena adakalanya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna tersaring dengan tehnik questioner.
- Observasi (Pengamatan), Yaitu mengamati secara Langsung objek yang diteliti guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan ketertiban umum Tertib usaha Operasional Warnet/Game station di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi/kantor tempat penelitian ini dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara	: Kabupaten Pelelawan
Selatan	: Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi
Barat	: Kabupaten Indragiri Hulu
Timut	: Prvinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah pada sector ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu factor pendukungnya adalah dengan memperbaiki system pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya.

Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industry. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

4.2. Deskripsi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

4.2.1. Sejarah Kecamatan Tembilahan

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Kuantan Singingi ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanan Indragiri Hulu ibu kotanya Rengat dan kewedanan Indragiri Hilir ibu

kotanya Tembilahan. Berawal dari keinginan untuk memisahkan diri maka melalui kesepakatan bersama, masyarakat Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (Otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 april 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1965 berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965. Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 2 kewedanan masing-masing:

Kewedanan Indragiri Hilir Utara dengan ibu kotanya Tembilahan meliputi Kecamatan :

1. Kecamatan Tempuling
2. Kecamatan Tembilahan
3. Kecamatan Gaung Anak Serka
4. Kecamatan Mandah
5. Kecamatan Kateman
6. Kecamatan Kuala Indragiri

Kewedanan Indragiri Hilir Selatan dengan ibu kotanya Enok meliputi Kecamatan:

1. Kecamatan Enok

2. Kecamatan Reteh **Sudinoto, SP,MM (2011:1-2)**

4..2.2. Profil Kecamatan Tembilahan

a. Geografis Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka

b. Keadaan Alamnya

Tinggi pusat Pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Dipinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

c. Iklim dan Curah Hujan

keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni 2010 yaitu 217 mm dan terendah pada bulan desember yaitu 42 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan juli sebanyak 23 hari dan terendah terjadi pada bulan januari sebanyak 7 hari.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota Tembilahan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, lingkungan hidup, perekonomian terutama tingkat pelayanan kemasyarakatan maka akan terjadi perubahan keseimbangan antara kuantitas/kualitas yang signifikan didalam suatu wilayah daerah pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan Kota Tembilahan yang merupakan daerah koleksi, distribusi dan pemasaran bagi produksi wilayah sekitarnya, terutama dalam menunjang sektor pertanian, industri dan perhubungan. Maka arah pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan mengacu pada proses pembangunan yang diupayakan melalui :

1. Pengembangan kawasan pelabuhan berikut sarana dan prasarana pendukung.
2. Penetapan kawasan pengolahan pertanian, peternakan, perkebunan.
3. Pembangunan peningkatan dan rehabilitas jaringan jalan darat terutama jaringan yang berhubungan dengan transportasi umum antara daerah yang diikuti dengan penetapan daerah sentral lokasi terminal, sub terminal dan pangkalan sementara
4. Alokasi sarana dan prasarana yang disesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan yang ada.

Dalam penetapan proses perencanaan pembangunan mengacu pada pelaksanaan Musrenbang RKPD pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dalam menetapkan kebutuhan ataupun prioritas perencanaan pembangunan. Dari aspek fisik perkembangan yang terjadi di kota Tembilahan tercermin di dalam pergeseran pola penggunaan lahan, seperti adanya perkembangan industri terutama di daerah yang jauh dari perkotaan seperti Kelurahan Seberang Tembilahan, Kelurahan Sungai Perak, dan Kelurahan Pekan Arba yang saat ini

merupakan daerah potensial pengolahan lahan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan

d. Penduduk

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah Indragiri Hilir juga memiliki system kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan dating dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke Indragiri Hilir yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut

Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada bulan desember 2010 sebanyak 65.752 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 32.004 jiwa dan perempuan 30.748 jiwa dengan sex ratio 104 serta kepadatan penduduk 318 jiwa per Km². Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian pangan, perkebunan, dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu (asli) antara lain :

1. Suku Banjar
2. Suku Bugis
3. Suku Jawa
4. Suku Laut/Nelayan. **BPS Kabupaten Indragiri Hilir (2011:1)**

Tabel 4.1 Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Tahun 2010

No	Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk
1	2	3	4
1	Seberang Tembilahan	1.786	7.447
2	Sungai Perak	844	3.360
3	Tembilahan Hilir	3.74	16.964
4	Tembilahan Kota	5.582	24.178
5	Pekan Arba	2.116	9.052
6	Sungai Beringin	2.078	8.523
Jumlah		16.146	69.524

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Tahun 2010

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5
1	Seberang Tembilahan	81.06	7.447	92
2	Sungai Perak	58.57	3.36	57
3	Tembilahan Hilir	14.57	16.964	1.164
4	Tembilahan Kota	3.34	24.178	7.239
5	Pekan Arba	19.11	9.052	474
6	Sungai Beringin	20.72	8.523	411
Jumlah		197.37	69.524	352

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

Tabel 4.3 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Tembilahan Tahun 2010

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Seberang Tembilahan	3.964	3.786	7.750
2	Sungai Perak	1.836	3.406	5.245
3	Tembilahan Hilir	6.862	6.671	13.533
4	Tembilahan Kota	12.129	11.720	23.849
5	Pekan Arba	3.688	3.427	7.115
6	Sungai Beringin	3.522	1.738	5.260
Jumlah		32.004	30.748	65.752

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

Tabel 4.4 Sex Ratio Penduduk Kecamatan Tembilahan Tahun 2010

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Sex Ratio
1	2	3	4	5
1	Seberang Tembilahan	3.807	3.64	104
2	Sungai Perak	1.761	1.599	110
3	Tembilahan Hilir	8.688	8.276	105
4	Tembilahan Kota	12.052	12.126	99
5	Pekan Arba	4.589	4.463	102
6	Sungai Beringin	4.177	4.346	96
jumlah		35.074	34.45	102

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

e. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Tembilahan masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat, sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan lain yang harus diatasi. Baik secara kuantitas maupun kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di Kecamatan Tembilahan. Sementara penyebaran tenaga yang ada masih belum merata secara proporsional

diberbagai daerah, terjadi konsentrasi atau penumpukan di kota kecamatan dan di kota kabupaten.

4.2.3. Motto Kecamatan Tembilahan

Motto kecamatan Tembilahan adalah Kota Ibadah yang merupakan frase atau kalimat yang dipergunakan sebagai semboyan atau symbol yang member makna pesan moral bahwa Tembilahan adalah Kota “Indah, Bersih, Asri, Damai, Aman dan Harmonis”. Dimana makna Ibadah mempunyai pesan moral bahwa nilai atau nuansa religious melekat pada masyarakat Kota Tembilahan yang Heterogenitas, memiliki kergaman budaya/suku dan agama dalam satu kesatuan hidup yang diwujudkan sehingga menjadi masyarakat kota yang harmonis.

4.2.4. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan

a. Visi

Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota “Ibadah” dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat paripurna
- 3) Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ
- 4) Mewujudkan pembangunan budaya tertib, buday bersih, dan budaya gotong royong

- 5) Menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah
- 6) Fungsi kawasan yang saling mendukung
- 7) Membangkitakan citra kota tepi sungai
- 8) Fungsi pelayanan kota dengan kelengkapan sarana dan fasilitasnya
- 9) Menjadikan Tembilahan Kota “*Water Front City*” dengan harapan menjadi “*Land Mark*” Kota Tembilahan dan pada gilirannya akan dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan daerah *hinterlandnya*.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

Sasaran :

Adanya rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya Pemerintah Kecamatan yang meliputi jangkauan dan mutu pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan.

Sudinoto, SP,MM (2011:4-5)

4.3 Satpol PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 moto praja wibawa, untuk mewedahi sebagian tugas pemerintahan daerah, sebenarnya tugas ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP sehingga setiap tanggal 3 maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer / angkatan perang.

Pada tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No. 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. Pamong memiliki arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti Kota, Negeri atau Kerajaan. Sehingga secara harafiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
4. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong praja juga berwenang:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hokum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. <http://www.referensimakalah.com/2012/10/pengertian-fungsi-dan-wewenang-pamong-praja.html>